



Media: Harian Jogja

Hari: Senin

Tanggal: 14 Agustus 2017

Halaman: 13

Media Massa : **Harjo** Hari : **Senin** Tanggal : **14/08/17** Halaman : **13**

**KINERJA DEWAN KOTA**

## Target 30 Raperda, Selesai Satu

**UMBULHARJO-**  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah segera mengevaluasi terkait dengan capaian pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) yang belum maksimal.

Ujang Hasanudin  
hasanudin@harjanjogja.com

Dari 30 raperda yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propempera) tahun ini, baru satu raperda yang sudah disahkan, lambatnya kinerja Dewan ini menjadi senam masyarakat. "Kami sudah agendakan untuk evaluasi kemungkinan mengurangi target penyelesaian raperda dari 30 raperda menjadi 26 atau 27 raperda," kata Ketua DPRD Kota Jogja, Sujanarko, saat dihubungi Minggu (13/8).

Berdasarkan data dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Jogja, satu raperda yang sudah disahkan, yakni Perda tentang Pertanggungjawaban

**Satu raperda yang sudah disahkan, yakni Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2016.**

**Lambatnya pembahasan raperda di antaranya ada banyak raperda lungsuran tahun lalu yang belum selesai**

Pelaksanaan APBD 2016, Perda tersebut merupakan perda yang rutin yang harus ada setiap tahun. Sujanarko mengungkapkan sejumlah faktor lambatnya pembahasan raperda lungsuran tahun lalu yang belum selesai dan harus diselesaikan penyelesaian Propempera 2017. Selain itu, juga karena proses fasilitasi di tingkat provinsi yang membutuhkan waktu.

Proses fasilitasi raperda di Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemda DIY yang seharusnya selesai dalam waktu 14 hari kerja, kata Sujanarko, terkadang tidak tepat waktu. "Ada yang sampai dua bulan belum

selesai," kata dia.

Karena itu, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini meminta Bapemperda memutuskan kembali skala prioritas pembahasan raperda mengingat masa efektif ketugasan anggota Dewan yang terbatas. Sampai akhir tahun ini, masa efektif kinerja Dewan kurang dari 30 hari. Sisanya tugas

di luar kantor seperti kunjungan kerja, advokasi dan reses.

Meski anggaran untuk pembahasan 30 raperda sudah tersedia, menurut Sujanarko bisa dialihkan. "Anggarannya bisa dialihkan ke program nonproleđa (propempera) misalnya kalau tiba-tiba ada usulan raperda baru dari eksekutif," ucap Sujanarko.

**KINERJA DEWAN KOTA**

**RAPERDA DISAHKAN**

Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2016.

- ✓ **RAPERDA BIBAHAS PANSUS**
- Raperda tentang Penataan Transportasi Lokal
- Raperda Perparkiran
- Raperda Tempat Khusus Parkir
- Raperda Retribusi Pelayanan di Tepi Jalan Umum
- Raperda Penyelenggaraan Tera atau Tera Ulang

➤ **RAPERDA DISUSUN NASKAH AKADEMIKNYA**

- Raperda Pemakaian Kekayaan Daerah
- Raperda Ketahanan Keluarga

✓ **EVALUASI**

- Target penyelesaian raperda dari 30 raperda menjadi 26 atau 27 raperda

Instansi	Tindak Lanjut
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Bag. Hukum</b></li> <li>2. ....</li> <li>3. ....</li> <li>4. ....</li> <li>5. ....</li> </ol> <p>✓ <b>Netral</b></p> <p>✓ <b>Biasa</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Untuk Diketahui</li> <li><input type="checkbox"/> Jumpa Pers</li> </ul> <p>.....</p> <p>Kepala Sekretaris</p>

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Maret 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005